

Pendahuluan

Dewasa ini, masyarakat Indonesia sedang mengalami penurunan kesadaran sejarah akibat dari pembelajaran sejarah yang belum optimal, terutama pada jenjang sekolah¹ khususnya SMA (Siswa Menengah Atas). Banyak pembelajaran sejarah yang hanya sekedar menghafal konsep, nama-nama kerajaan, raja, tokoh, tanggal dan tahun dari suatu peristiwa serta kelahiran atau meninggalnya seorang tokoh.² Terlebih lagi semangat nasionalisme yang luntur dari generasi muda terutama siswa SMA saat ini. Padahal, sejarah berperan dalam menumbuhkembangkan rasa nasionalisme. Selain itu juga, sejarah dapat digunakan sebagai wahana pendidikan yang membebaskan.³ Program pendidikan nasional yang berjalan akan ditentukan oleh kurikulum, dikarenakan kurikulum merupakan jantung pendidikan.⁴ Menurut Muhammad Nursyam, kurikulum merupakan “jalan” terdekat untuk sampai pada tujuan pendidikan.⁵

Sebagai program pendidikan, kurikulum berperan untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang ataupun yang akan dihadapi nantinya oleh peserta didik⁶, terutama dalam hal pengajaran sejarah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, dalam perkembangannya, pengajaran sejarah dijadikan alat politik dan legitimasi kekuasaan semata.⁷ Sejarah juga menjadi alat propaganda pada masa Orde Baru.⁸

Pada masa Orde Baru, pengajaran sejarah sarat dengan nuansa politis penguasa. Terlebih lagi pemerintah hanya fokus pada bidang pembangunan dan ekonomi fisik. Jadi hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan fokus pemerintah tidak begitu di perhatikan, termasuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah, terutama pembelajaran sejarah. Seperti yang disampaikan oleh mantan Menteri P dan K (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), Nugroho Notosusanto bahwa bidang humahiora termasuk sejarah memang kurang dihargai sehingga jarang dikenal.⁹

Sebenarnya pada kurikulum 1984, pengajaran sejarah seperti mendapat “angin segar”. Pada waktu itu yang menjabat sebagai Menteri P dan K adalah Nugroho Notosusanto. Beliau menerapkan PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri.¹⁰ Sejarah menjadi mata pelajaran yang elit walaupun memang terjadi dualisme pembelajaran sejarah yakni adanya Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia serta PSPB.

¹Sardiman A.M, *Reformulasi Pembelajaran Sejarah: Sebuah Tantangan*, dalam Seminar Nasional tentang “Reformulasi Pembelajaran Sejarah” di Ruang Ki Hajar Dewantara, FIS, Universitas Negeri Yogyakarta, hari Rabu, 3 Oktober 2012, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Buana, 1995, hlm. 24.

⁴Departemen Pendidikan Nasional; Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, Naskah Akademik Kajian Standar Isi Pendidikan Menengah (SMA), 2007, hlm. 1.

⁵Mohammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, cet. Ke III, Surabaya: Usaha Nasional, 1986, hlm. 74.

⁶ Rochiaty Wiriaatmaja, *Landasan Filosofis Kurikulum Pengajaran Sejarah (SMU) Tantangan dan Harapan*, dalam Simposium Pengajaran Sejarah (kumpulan Makalah Diskusi), Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta, dengan tema “Pengajaran Sejarah Kearifan Lokal Masa Lalu Untuk Menyongsong Tantangan Abad ke 21”. 1998, hlm, 93.

⁷ Aman, *Model Evaluasi Pembelajaran Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2011, hlm. 46.

⁸ Asvi Warman Adam, *Seabad Kontroversi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007, hlm. 113.

⁹ Lihat Kumpulan Sambutan Prof. DR. Nugroho Notosusanto, “Mengemban Masa Depan”, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1985, hlm. 29.

¹⁰ Ary. H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, edisi revisi, 1995, hlm. 112. Lihat juga *Kompas*, 11 Juni 1983, “Arah Pendidikan Nasional Lima Tahun Mendatang”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis. Menurut Kuntowijoyo, penelitian sejarah mempunyai lima tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan.¹¹

Pembahasan

1. Pemikiran NUgroho Notosusanto tentang Pengajaran Sejarah

Nugroho Notosusanto lahir di rumah kakeknya, R.P. Notowijoyo yang merupakan mantan Patih Rembang di kampung Pandean pada tanggal 15 Juni 1931. Ibunda Nugroho Notosusanto yang bernama Tini merupakan putri seorang *Hoofd* Jaksa di Rembang.¹² Nugroho Notosusanto melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Yogyakarta sekaligus aktif sebagai Tentara Pelajar.¹³ Pada awalnya ia Nugroho bingung, setelah tamat dari SMA, untuk terus melanjutkan diri dalam dunia militer atau ke perguruan tinggi, akhirnya, pilihannya adalah ke perguruan tinggi, di Universitas Indonesia, Fakultas Sastra, Jurusan Sejarah.¹⁴ Nugroho Notosusanto aktif dalam berbagai kegiatan sebagai aktivis kampus serta menulis cerpen.

Setelah menyelesaikan masa studi di FSUI, Nugroho Notosusanto mengabdikan diri sebagai dosen di FSUI. Setahun kemudian, Nugroho Notosusanto diangkat menjadi Kepala Lektor FSUI. Kemudian, Nugroho Notosusanto ke University of London untuk memperdalam keilmuannya terhadap Metode dan Filsafat Sejarah. Sebelum berangkat, Nugroho Notosusanto mempersunting seorang gadis bernama Erma Savitri dan dibawa ke London.¹⁵ Sepulang dari London, karir Nugroho Notosusanto semakin meroket.

Pemikiran Nugroho Notosusanto tentang sejarah memang menuai kontroversi. Nugroho Notosusanto berpendapat bahwa sejarah adalah suatu seni dan juga suatu ilmu. Sejarah juga merupakan suatu kisah dan juga sejarah suatu peristiwa. Sejarah sebagai kisah merupakan hasil karya dari sejarawan yang dituliskan melalui sejarah sebagai peristiwa.¹⁶ Dari sisi penafsiran dan penulisan, sejarah bersifat seni, sedangkan dari segi penelitian sumber, sejarah bersifat ilmiah.¹⁷ Maka dari itulah, Nugroho Notosusanto berpendapat bahwasanya, sejarah mencakup seni dan juga ilmu.

Nugroho Notosusanto aktif dalam dunia kemiliteran. Nugroho Notosusanto menjabat sebagai Kepala Pusat Sejarah ABRI dan menjadi staf pengajar di Lembaga Pertahanan Nasional. Memang pada saat itu, militer membutuhkan kaum akademisi untuk menghindari bahaya komunisme. Maka dibentuklah Lembaga Sejarah Hankam (lalu menjadi Pusat Sejarah ABRI) yang diketuai oleh Nugroho Notosusanto. Sejak saat itu Nugroho Notosusanto diberi gelar tituler, Letnan Kolonel dan naik terus hingga Brigadir Jenderal. Hal itu dilakukan untuk mempermudah komunikasi atau hubungan dalam angkatan bersenjata.

¹¹ Kuntowijoyo, *op.,cit*, hlm. 90.

¹² Lihat Keluarga Nugroho Notosusanto, "Mengenang Nugroho Notosusanto", dalam Peter Kasenda, *Nugroho Notosusanto: Pendidik, Sejarawan, dan Pejabat Tinggi*, Basis, No. 1 Tahun XIX, (1990), hlm. 73.

¹³ S. Sumardi dkk, *Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, (1984) hlm. 73.

¹⁴ Peter Kasenda, *op.cit*, 73-74.

¹⁵ "Nyonya Erma Savitri", *Suara Karya*, 8 Juli 1984.

¹⁶ Nugroho Notosusanto, *Sedjarah dan Hankam*, Jakarta: Lembaga Pertahanan Nasional, 1968, hlm. 8.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 12.

Nugroho Notosusanto mulai memusatkan perhatiannya di Pusat Sejarah ABRI, namun tetap menjadi dosen di FSUI.¹⁸

Pada tahun 1980, Nugroho Notosusanto mendapat gelas professor. Dua tahun kemudian, Nugroho Notosusanto menjadi Rektor UI. Pada tahun 1983, Nugroho Notosusanto menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Menteri P dan K) RI.¹⁹ Saat menjabat sebagai Menteri P dan K, Nugroho Notosusanto melakukan perubahan dengan mengganti kurikulum lama (1975) ke ke kurikulum baru, Kurikulum 1984 yang mulai diberlakukan pada jenjang SMA. Di dalam Kurikulum 1984, terdapat program inti dan program pilihan. Program inti itu wajib diambil oleh setiap siswa dan pengajaran sejarah masuk kedalam program inti.²⁰

Nugroho Notosusanto juga melakukan beberapa perubahan dengan memisahkan sejarah dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).²¹ Pada jenjang SMA menjadi SNID (Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia). Selain itu Nugroho Notosusanto juga menerapkan kebijakan dengan memunculkan PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) yang merupakan bagian dari Pendidikan Pancasila. Jadi, seperti terjadi dualisme pengajaran sejarah di SMA. PSPB merupakan program yang berdiri sendiri²², diajarkan selama tiga semester. Materi dari PSPB ini adalah dari kemerdekaan hingga masa kini (Orde Baru).²³ Nugroho Notosusanto mengambil kebijakan tersebut diakarenakan pada kurikulum terdahulu tidak ada pelajaran sejarah nasional dan kurang dapat tempatnya pendidikan humaniora. Padahal humaniora sangat penting untuk diajarkan kepada siswa agar menjadi bekal ruhani dan pembentukan watak atau kepribadian.

2. Implementasi Kebijakan Nugroho Notosusanto dalam Pengajaran Sejarah di SMA (1983-1985)

Untuk buku acuan dari Sejarah Nasional Indonesia yang diajarkan di SMA adalah buku babon SNI hasil dari Seminar Sejarah Nasional II di Yogyakarta. Nugroho Notosusanto mendapat bagian editor pada jilid enam. Jilid enam merupakan jilid yang banyak dikritik karena terlalu subyektif. Sedangkan untuk PSPB, pada awal-awal diajarkan pada tahun ajaran 1984/1985 menggunakan buku "30 Tahun Indonesia Merdeka". Buku tersebut terbitan resmi dari Pemerintah dan juga penanggung jawab penyusunan naskah oleh Nugroho Notosusanto. Buku-buku yang dijadikan acuan tersebut sarat dengan propaganda Orde Baru dalam meligitmasi kekuasaan. Peranan militer menjadi poin utama dalam pengajaran sejarah pada masa Orde Baru.

Berdasarkan SNI tersebut Nugroho Notosusanto bersama Yusmar Basri (sejarawan PuSjarah ABRI) menyunting buku Sejarah Nasional Indonesia untuk SMA. Buku itu diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Balai Pustaka, 1986. Buku SNI yang banyak menuai kritik dan penuh kontroversi ini diterima Presiden Soeharto pada 18 Maret 1976 dan atas perintah presiden buku tersebut dipergunakan disekolah-sekolah pemerintah.²⁴

¹⁸ Peter Kasenda, *op.cit*, hlm. 76-78.

¹⁹ Sumardi dkk, *op.cit*, hlm. 76.

²⁰ Lihat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 1984.

²¹ Syamsurizal, Kurikulum 1984 di harapkan Banyak Mencetak Tenaga "Siap Pakai", *Bernas*, 23 April 1984.

²² *Kompas*, 5 Oktober 1983.

²³ Garis-Garis Besar Pedoman Pengajaran 1984, Program Pendidikan Sejarah perjuangan Bangsa.

²⁴ Bambang Purwanto dan Asvi Varman Adam, *Menggugat Historiografi Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2013, hlm. 69-70.

Perlu diketahui juga bahwa pada kurikulum 1984 diterapkan sistim kredit²⁵, terutama di SMA dimaksudkan untuk meningkatkan tepat guna, daya guna dan hasil guna pendidikan yang sekaligus dikaitkan pula dengan sistim penilaian siswa. Rincian sistim kredit ini sebagai berikut. Satu kredit sama dengan satu jam pelajaran tatap muka + ½ jam pelajaran pekerjaan rumah perminggu per semester. 1 jam pelajaran sama dengan 45 menit. Adapun jumlah beban kredit untuk SMA sebagaimana tercantum dalam program kurikulum 1984 adalah 222 kredit.²⁶

Pada saat Nugroho Notosusanto menjabat Menteri P dan K, dibuatlah tim untuk pembuatan buku SNI dan PSPB dalam stu tim sedangkan Sejarah Dunia pada tim lainnya. Untuk buku Sejarah Nasional Indonesia dan PSPB, berdasarkan keputusan Menteri P dan K ditunjuk tim penulisan buku teks yang bertugas menyempurnakan kurikulum dan pedoman pekasanaannya serta melaksanakan penulisan buku pelajaran dan buku pegangan guru dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Tingkat Menengah Atas dalam satu tim yang diketuai oleh Prof. Dr. Ny. Cony Setiawan²⁷, sedangkan untuk tim penulisan buku standar Sejarah Dunia yang dipakai di perguruan tinggi sekaligus dijadikan buku babon dari sejarah dunia untuk Sekolah Tingkat Dasar hingga Menengah Umum dan Atas diketuai oleh Prof. Dr. Marwati Djoened Poesponegoro.²⁸

Mengenai PSPB, Nugroho Notosusanto mengatakan bahwa PSPB dimasukkan sebagai unsur pembinaan mental bangsa. Materi yang digunakan mengambil peristiwa-peristiwa sejak proklamasi hingga kini, maka dari itu harus ditekankan segi afektifnya.²⁹ Selain itu juga, PSPB diharapkan mampu untuk berperan dalam menanamkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda.³⁰

Struktur program PSPB merupakan program mata pelajaran yang berdiri sendiri dan disediakan waktu dua jam pelajaran setiap minggu. Bahan pengajaran secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan usaha meneruskan semangat 1945. Penekanan diberikan pada pengembangan ranah afektif. Ruang lingkup bahan berdasarkan pendekatan matra yang mengandung lebih dari satu matra. Politik tetapi juga matra sosial, ekonomi, agama, budaya, ideologi, pendidikan, dan atau hankam. Serta setiap peristiwa disajikan merupakan suatu kebulatan.³¹

3. Realitas Pengajaran Sejarah di SMA (1983-1985)

Orde Baru lahir dalam upaya memurnikan Pancasila dan dalam misi pembangunan. Orde Baru menilai, bahwasanya Orde Lama tidak melaksanakan Pancasila secara murni. PSPB merupakan salah satu wahana untuk membangun Pancasila kembali. Namun, realita dilapangan justru sebaliknya. Tetap saja pengajaran sejarah dijadikan agen sosialisasi politik. Penguasa ingin menghasilkan generasi yang taat

²⁵Yang dimaksud dengan sistim kredit adalah ukuran satuan beban belajar siswa yang ditentukan oleh jumlah tatap muka dan pekerjaan rumah per-minggu per semester.

²⁶B. Suryosubroto, *op.,cit*, hlm. 97. Lihat juga keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0486/U/1984.

²⁷ Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Tim Penyusunan Buku teks PSPB dan SNI, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1985.

²⁸ Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Tim Penyusunan Buku a Standar Sejarah Dunia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1985.

²⁹Lihat *Kompas*, Rabu 5 Oktober 1983, hlm. 56. Lihat juga GBPP 1984 PSPB (lampiran 3)

³⁰Soedijarto, "Pengajaran sejarah Sebagai Wahana Pendidikan Nilai dan Sikap, dalam Simposium Pengajaran sejarah (Kumpulan Makalah Diskusi), Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998, hlm. 12.

³¹Ary.H.Gunawan, *op,cit*, hlm. 116-117.

terhadap pemerintah. Ideologi militerisme menjadi sosok yang sangat dibanggakan dalam pengajaran sejarah pada masa Orde Baru, terlebih lagi saat Nugroho Notosusanto menjabat sebagai Menteri P dan K.

Sentralisasi kurikulum mewarnai pola pembelajaran di sekolah-sekolah. Mulai dari metode, bahan ajar dibuat seragam. Guru tidak punya kebebasan untuk mengajarkan diluar apa yang diinginkan oleh pemerintah. Sepanjang Orde Baru tidak dimungkinkan untuk memunculkan pemikiran berbeda, kritis, dan transformatif. Penyeragaman itu perlu dilakukan pemerintah untuk mengontrol masyarakat.³² Hal itu mengindikasikan bahwa terjadi disorientasi dari pengajaran sejarah. Pengajaran sejarah harus membentuk generasi-generasi yang kritis, memiliki pemikiran yang transformatif.

Kurikulum 1984 menekankan sektor pendidikan harus mendukung pembangunan bangsa di segala bidang. Pengajaran sejarah pada masa itu tidak hanya menggariskan sejarah nasional dan dunia saja, akan tetapi juga muncul PSPB yang secara terpisah berdiri sendiri sebagai program kurikulum sejarah.³³ Melalui pelajaran sejarah anak didik diarahkan untuk menjadi anak-anak yang mengenal tanggung jawab, cinta bangsa negara, menjunjung tinggi kehormatan bangsa sendiri, serta meresapi nilai-nilai sejarah.³⁴ Namun, ternyata realita di lapangan tidak menghadirkan pembelajaran sejarah yang benar-benar adil dan menyeluruh, Sejarah tetap dijadikan ajang politisasi penguasa, walaupun Menteri P dan K pada waktu itu dari sejarawan.

Pengajaran sejarah seakan menjadi tumpuan hegemoni penguasa. Semua hal tersebut tidak lepas dari keinginan pemerintah untuk memantapkan ideologi yang dianut pemerintah. Apabila ideologi sentralistik telah ditetapkan, maka disanalah bentuk “penjajahan” baru akan dimulai. Orde Baru, dengan kekuatan penuh meneghegemoni seluruh sendi kehidupan masyarakat tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Justru melalui pendidikan, pemerintah menunjukkan eksistensi mereka terutama dalam pengajaran sejarah.

Permasalahan diatas mengarah pada suatu pemikiran bahwa Orde Baru dengan kekuatan penuh melakukan sentralisasi kurikulum. Tidak hanya sentralisasi kurikulum, akan tetapi yang lebih ironis sekali adalah penyelenggaraan pendidikan nasional yang pragmatis karena selama 32 tahun Orde Baru berdiri, orientasi pemerintah adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelanggaran kekuasaan.³⁵ Pendidikan juga dijadikan ajang indoktrinasi kepada masyarakat dan generasi muda. Semua itu dilakukan dengan penyeragaman kurikulum, kurikulum yang sentralistik.

Dalam hal ini, sejarah lokal tidak mendapat ruang yang nyaman dalam penulisan dan pengajaran sejarah Indonesia. Darmaningtyas menyampaikan, apalagi kalau yang disampaikan hanya perihal sejarah perang semata dan tokoh-tokoh militer belaka, ini menandakan pelajaran sejarah mendorong penguatan ideologi militersitik.³⁶ H.A.R. Tilaar mengatakan bahwa “peranan ideologi dalam pendidikan nasional di Indonesia bisa dilihat dalam UU Pendidikan Nasional yang mendasarkan pendidikan pada Pancasila”. Selama Orde Baru, indoktrinasi ideologi telah mematikan kreatifitas peserta didik. Ideologi yang seharusnya menjadi pembimbing telah berubah menjadi alat penekan dari penguasa dalam mengendalikan pendidikan nasional.³⁷

Sebagai sebuah ilustrasi mengenai penggunaan sejarah untuk menjelaskan berbagai persoalan didalam doktrin strategi dapat diketengahkan referensi kepada sejarah didalam Doktrin *Tjatur Eka Karma*

³² Darmaningtyas, *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis: Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm 129-133.

³³ Aman, *Model Evaluasi Pembelajaran Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2011, hlm. 48.

³⁴ “Pelajaran IPS Harus Merangsang Anak Didik Berfikir Sendiri”, Kompas, 31 Maret 1983, hlm. XI.

³⁵ Darmaningtyas, *op.,cit*, hlm. 126.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 133.

³⁷ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran kekuasaan*, Jakarta: Rineka Cipt, 2009, hlm. 131.

yang disusun dalam dua bab. Bab pertama berisikan pembukaan mengenai perjuangan bangsa serta bab ke dua yang berisikan peranan ABRI. ABRI sebagai Bhayangkara Negara dan Bangsa.³⁸ ABRI sendiri adalah contoh dari pada integrasi nasional. Dewasa ini boleh dikatakan bahwa ABRI adalah institusi yang paling bersifat nasional dalam artian bahwa anggota ABRI yang mewakili seluruh bangsa maupun semua lapisan yang ada.³⁹

Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang terintegrasikan kedalam pendidikan nasional serta pengajaran sejarah. Berarti bisa dikatakan bahwa realita pengajaran sejarah pada masa ini begitu sarat dengan nuansa politik dan doktrin ideologi. Pembelajaran sejarah tetap tidak membentuk atau membangun jiwa manusia yang bijaksana karena sejarah diajarkan dengan tidak bijaksana. Hal ini juga merupakan suatu dilemma bagi pengajaran sejarah pada saat itu. Di satu sisi, pengajaran sejarah menjadi pengajaran yang elit dan bisa dikatakan mencapai masa kejayaannya, namun disisi lain, terdapat muatan-muatan politik penguasa yang menghegemoni dan demi legitimasi kekuasaan semata.

Tiga tahun memang waktu yang sangat kurang untuk menilai sebuah pemerintahan atau kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat umum berhasil atau tidak berhasil. Apalagi dalam bidang pendidikan yang sudah memiliki akar permasalahan yang sangat kompleks. Permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia yang dari dahulu bahkan sampai sekarang masih belum terselesaikan dengan baik karena terlalu sering berubah dan kurang melihat kondisi zaman. Pendidikan selalu berbenturan dengan politik karena politik terlalu dominan dalam dunia pendidikan. Selain itu, pendidikan di Indonesia kurang "diperhatikan" lantaran tidak menjamin kekuasaan seseorang dalam waktu yang singkat. Ekonomi jauh lebih utama karena berdampak langsung, sedangkan pendidikan baru akan bisa dirasakan dalam jangka panjang.

Nugroho Notosusanto hanya menjabat selama tiga tahun dalam menjalankan tugas sebagai Menteri P dan K dikarenakan tutup usia saat menginjak usia jabatan tiga tahun dari 1983-1985. Sebenarnya, masih banyak yang bisa Nugroho Notosusanto lakukan untuk memperbaiki dunia pendidikan saat itu kalau masih berumur panjang. Diluar kontroversi Nugroho Notosusanto baik sebagai seorang sejarawan maupun sebagai pendidik, usaha untuk merubah skema pendidikan di Indonesia selama tiga tahun tersebut cukup dikatakan suatu keberhasilan tersendiri, khususnya bagi pengajaran sejarah tanpa mengesampingkan kurikulum atau mata pelajaran yang lain.

Nugroho Notosusanto berupaya mengembalikan pelajaran sejarah sebagai suatu disiplin ilmu yang tidak cukup hanya dijadikan bagian dari suatu disiplin ilmu. Hal itu dikarenakan beberapa permasalahan yang dilihat pada periode sebelumnya yakni hanya menekankan aspek intelektualitas semata sedangkan aspek moralitas kurang. Untuk itulah Nugroho Notosusanto berusaha melakukan hal yang bisa dilakukan sebagai seorang sejarawan, sebagai pendidik, dan sebagai putra bangsa. Walaupun, nantinya kebijakan-kebijakan yang diambil bernuansa politis dan juga kontroversi.

Penutup

Pendidikan merupakan obat dari segala macam "penyakit" yang menjangkiti suatu bangsa dan negara. Pendidikan juga merupakan landasan untuk memajukan peradaban bangsa dan negara. Tanpa pendidikan, runtuhlah suatu negara karena tidak memiliki generasi penerus yang mampu bertahan dan mengembangkan negara tersebut. Pendidikan seharusnya dijadikan landasan untuk memperkuat

³⁸ Nugroho Notosusanto, *Sedjarah dan Hankam*, Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan (Lembaga Sedjarah Hankam), 1968, hlm. 25.

³⁹ Nugroho Notosusanto (ed), *Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hlm. 26.

persatuan dan kesatuan terutama dalam negara yang majemuk. Namun, pendidikan bisa menjadi alat untuk meraih kekuasaan, menanamkan ideologi, dan lain sebagainya yang membuat generasi penerus adalah generasi yang meneruskan ideologi tertentu, politik tertentu, jadi bukan untuk kebaikan bersama yang lebih baik. Itulah yang terjadi di Indonesia.

Nugroho Notosusanto merupakan salah satu Menteri P dan K di Indonesia. Beliau menjabat selama tiga tahun, mulai dari 1983-1985. Nugroho Notosusanto merupakan seorang tokoh sejarah yang memiliki wilayah akademisi Universitas Indonesia (UI). Kuliah di UI dan menganbdikan diri di UI baik sebagai dosen hingga menjadi Rektor sekaligus menjabat Menteri P dan K menggantikan menteri terdahulu yakni Daud Joesuf.

Karir Nugroho Notosusanto tidak hanya dalam dunia pendidikan saja. Nugroho Notosusanto juga merupakan warga sipil yang bergerak dalam dunia kemiliteran. Nugroho Notosusanto pernah menjabat sebagai kepala PuSjarah (Pusat Sejarah) ABRI, menjadi pengajar di AKABRI dan SESKO. Nugroho Notosusanto mengajarkan sejarah militer bagi perwira-perwira tersebut. Maka, tidak heran kalau Nugroho Notosusanto sering disebut juga sejarawan militer. Terbukti dengan pembelajaran sejarah di sekolah, terutama menengah atas, pembelajaran sejarah begitu didominasi oleh peran militer.

Nugroho Notosusanto menjabat sebagai Mentri P dan K, membuat sebuah keputusan yang mengejutkan dengan menggantikan atau menyempurnakan kurikulum terdahulu yakni kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984. Banyak perubahan dan inovasi yang dilakukan Nugroho Notosusanto dalam upaya memperbaiki sistim pendidikan nasional walaupun berujung pada kontroversi karena tidak bisa dipungkiri juga bahwa peran penguasa sangat dominan terutama dalam porsi pembelajaran sejarah.

Nugroho Notosusanto mengambil sebuah keputusan dengan membagi kurikulum sejarah menjadi dua mata pelajaran yakni PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) dan SNID (Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia). Pada kurikulum 1984, pengajaran sejarah dibuat berdiri sendiri tidak bergabung dengan IPS seperti pada kurikulum terdahulu karena agar pelajaran sejarah bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tujuan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pada kurikulum 1984, ada beberapa perubahan seperti diterapkannya program inti dan program pilihan. Pelajaran sejarah, PSPB dan SNID, masuk dalam program inti yang berarti wajib diajarkan kepada semua jenjang pendidikan dan program pilihan. Permasalahannya adalah pelajaran sejarah itu begitu subyektif hingga apa yang diajarkan hanya demi kepentingan satu kelompok saja.

Permasalahan itu tidak mungkin dihindari karena sejarah sangat subyektif. Apa yang dikatakan benar oleh seseorang belum tentu benar oleh yang lain. Sejarah selalu brbicara mengenai kebenaran, akan tetapi kebenaran itu sendiri juga relative. Kebenaran mutlak hanyalah milik Tuhan. Pembelajaran sejarah seharusnya bukanlah hanya membicarakan kebenaran ataupun kesalahan orang lain dimasa silam, namun perlu juga bahkan amat penting dalam pelajaran sejarah yakni hikmah dari peristiwa tersebut.

Pengalaman-pengalaman membentuk kepribadian, prinsip, dan jati diri seseorang. Pengalaman-pengalaman Nugroho Notosusanto yang berbuah gagasan-gagasan yang keluar saat menjabat Menteri P dan K dinilai kontroversi karena sangat berat sebelah dan tidak adil dalam menyampaikan sejarah Indonesia. Hal-hal yang tidak sejalan dengan Orde Baru begitu dikucilkan dan yang berkaitan dengan Orde Baru diabaikan. Jadi, jelas kiranya bahwa pengajaran sejarah belum memiliki ruang gerak yang bebas dalam menyampaikan realita. Entah itu kebenaran ataupun kesalahan harus disampaikan apa adanya.

Nugroho Notosusanto juga merupakan manusia biasa yang rentan melakukan kesalahan. Tiga tahun menjabat sebagai Menteri P dan K memang waktu yang sangat kurang untuk memperbaiki sistim pendidikan yang sudah carut marut dan memiliki permasalahan yang sangat kompleks. Paling tidak, Nugroho Notosusanto sudah berupaya untuk meletakkan posisi sejarah sebagai mana mestinya. Namun, memang dalam realita dilapangan banyak hal yang perlu ditinggalkan untuk perbaikan dimasa mendatang.

Memang apa yang terjadi pada saat Nugroho Notosusanto menjadi Menteri P dan K (1983-1985) cukup memprihatinkan disamping juga menggembirakan. Dualisme pemebelajaran sejarah terutama diberlakukan kurikulum 1984 pada tahun ajaran 1984/1985. Kurikulum sejarah yang bertahan selama

Sembilan tahun ini cukup memberikan dampak signifikan dalam pembelajaran sejarah di sekeolah terutama di SMA karena kurikulum 1984 pertama kali berlaku pada jenjang SMA. Kurikulum sejarah bertujuan menjadikan generasi penerus bangsa menjadi manusia yang Pancasilais dan mendukung Orde Baru.

Daftar Pustaka

Aman. (2011). *Model Evaluasi Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Ary. H. Gunawan. (1995). *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asvi Warman Adam. (2007). *Seabad Kontroversi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Bambang Purwanto dan Asvi Varman Adam. (2013). *Menggugat Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.

Darmaningtyas. (1999). *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis: Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Pendidikan Nasional; Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum. Naskah Akademik Kajian Standar Isi Pendidikan Menengah (SMA). 2007.

Garis-Garis Besar Pedoman Pengajaran 1984, Program Pendidikan Sejarah perjuangan Bangsa.

H.A.R. Tilaar. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Tim Penyusunan Buku a Standar Sejarah Dunia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1985.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Tim Penyusunan Buku teks PSPB dan SNI, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1985.

.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 1984.

Kumpulan Sambutan Prof. DR. Nugroho Notosusanto. "Mengemban Masa Depan". Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1985.

Kuntowijoyo, (1995), *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.

Kompas. 5 Oktober 1983

Kompas. 11 Juni 1983, "Arah Pendidikan Nasional Lima Tahun Mendatang".

Mohammad Noor Syam. (1986). *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*. cet. Ke III. Surabaya: Usaha Nasional.

Nugroho Notosusanto (ed). (1984). *Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*. Jakarta: Sinar Harapan.

_____. (1968). *Sedjarah dan Hankam*. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan (Lembaga Sedjarah Hankam).

“Nyonya Erma Savitri”. *Suara Karya*. 8 Juli 1984.

Pelajaran IPS Harus Merangsang Anak Didik Berfikir Sendiri”. *Kompas*. 31 Maret 1983

Peter Kasenda. “Nugroho Notosusanto: Pendidik, Sejarawan, dan Pejabat Tinggi”, *Basis*, (1990), No. 1 Tahun XIX,

Rochiaty Wiriaatmaja, “Landasan Filosofis Kurikulum Pengajaran Sejarah (SMU) Tantangan dan Harapan”, dalam Simposium Pengajaran Sejarah (kumpulan Makalah Diskusi), Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta, dengan tema “Pengajaran Sejarah Kearifan Lokal Masa Lalu Untuk Menyongsong Tantangan Abad ke 21”. 1998.

S. Sumardi dkk. *Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. (1984).

Syamsurizal. “Kurikulum 1984 di harapkan Banyak Mencetak Tenaga “Siap Pakai”, *Bernas*, 23 April 1984.